

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Konsep

2.1.1. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata “Daya” yang memiliki arti kekuatan atau kemampuan (Sulistiyani (2004, 7). Sementara itu, menurut Priyono (1996, 55) pemberdayaan adalah proses masyarakat untuk menuju berdaya, yakni proses memberikan dorongan atau memberi motivasi kepada individu atau kelompok agar memilikikemampuan atau keberdayaan guna menentukan hidupnya yang akan datang serta pemberdayaan harus difokuskan kepada masyarakat atau kelompok tertinggal atau terbelakang.

Roesmedi dalam jurnal Sutra (2020, 15) pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai; meningkatkan kualitas mencapai kemandirian masyarakat dalam skala pembangunan nasional.

Sementara itu upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek:

1. Menciptakan suasana yang berpotensi dalam pengembangan masyarakat.
2. Meningkatkan potensi yang dimiliki masyarakat dengan memfasilitasi langkah serta prosesnya melalui bantuan seperti dana, pembangunan sarana dan prasarana, diadakannya pelatihan, perbaikan lingkungan sosial serta perbaikan dalam keikutsertaannya di kelembagaan daerah.

3. Diberikannya perlindungan kepada kelompok lemah sehingga terciptanya keberpihakan yang seimbang, hal ini tentunya agar memunculkan kondisi yang sprotif serta dapat saling menguntungkan bagi setiap mitra.

Selanjutnya, Kartasmita (2007, 28) menjelaskan bahwa "Hal pertama yang harus dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah dengan menciptakan kondisi yang seimbang dalam menggali potensi masyarakat". Jika dilihat dari sudut pandang ilmu sosiologi, Hikmat (2006, 9) menjelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan pemberdayaan yaitu usaha untuk meningkatkan peran dengan bentuk kolaborasi antara kedua pihak yakni masyarakat dan lembaga atau mitra yang menaunginya.

Dari berbagai konsep serta makna dari pemberdayaan seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa memberdayakan masyarakat memiliki arti yang sama dengan memfasilitasi masyarakat, atau lembaga dan organisasi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup baik di bidang ekonomi, social maupun politik agar lebih sejahtera. Oleh karenanya pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi ketidak berdayaan masyarakat yang mana sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan akses maupun fasilitas, ketertinggalan baik secara keterampilan dan pengetahuan, serta kondisi kemiskinan yang terus berputar tanpa adanya solusi.

Mengenai pemberdayaan bagi kelompok perempuan, Katjasungkana dalam Nugroho, (2008) yang menjelaskan adanya empat indikator dalam pemberdayaan, yaitu:

- 1) Akses, yaitu memiliki hak yang sama dalam mengakses sumberdaya yang ada di lingkungan sehingga dapat meningkatkan potensi diri atau masyarakat.
- 2) Partisipasi, ketersediaan masyarakat dalam ikut serta memberdayakan atau menggunakan asset yang ada.
- 3) Kontrol, hal ini dimaksud bahwa setiap masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam menjaga sumber daya yang ada untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya.
- 4) Manfaat, diartikan bahwa setiap masyarakat baik laki-laki maupun perempuan harus sama-sama merasakan atau menikmati pembangunan dan kebermanfaatan sumber daya yang ada dengan setara.

Menurut Profesor Gunawan Sumodiningrat yang dikutip oleh Nugroho (2008), ada tiga langkah yang dianggap berkelanjutan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- 1) Pemihakan, dengan memberdayakan kaum perempuan artinya perempuan harus mendapatkan keberpihakan tersebut dibandingkan kaum laki-laki.
- 2) Penyiapan, pemberian bekal serta mempersiapkan kemampuan kaum perempuan untuk mengakses, ikut serta, menjaga, dan memperoleh manfaat yang diberikan.
- 3) Perlindungan, yaitu memberikan layanan yang terbaik dan tidak melepaskan begitu saja perempuan yang telah diberi pemberdayaan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu prosedur atau kegiatan yang melibatkan pemberian dorongan dan kekuatan

kepada seseorang untuk memperbaiki diri. Selanjutnya pemberdayaan perempuan yang menjalankan usaha rumahan di Kota Pontianak sebagai pemilik dan pengelola inilah yang dimaksud dengan pemberdayaan dalam penelitian ini.

a. Program Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi Melalui *Home Industry*

Upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian wanita di Indonesia, khususnya pada wilayah atau daerah yang tertinggal, tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya, hal yang dianggap sebagai keterbatasan tersebut seperti kualitas pendidikan yang rendah, kurangnya keterampilan, kesempatan kerja yang terbatas, serta perspektif masyarakat terhadap perempuan dan rumah tangga. Sering kali kaum perempuan juga akan dihadapkan dengan suatu masalah tertentu yang kemudian dikenal dengan istilah "*triple burden of women*", yaitu suatu dogma yang mengatakan wanita harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat.

Kemungkinan perempuan untuk memajukan diri, seperti memperoleh pekerjaan dan pendidikan, sangat terhambat akibat masalah ini. Untuk mengatasi masalah ini, pemberdayaan perempuan sangat penting. Tujuan program pemberdayaan perempuan sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2008, 164):

- 1) Meningkatkan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek pembangunan sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek pembangunan seperti yang terjadi di masa lalu.

- 2) Meningkatkan kapasitas perempuan dalam kepemimpinan, daya negosiasi, dan partisipasi perempuan dalam semua aspek pembangunan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- 3) Meningkatkan keterampilan manajerial perempuan di perusahaan skala rumah tangga, industri kecil dan besar untuk mendukung peningkatan kebutuhan rumah tangga dan menciptakan prospek pekerjaan yang mandiri dan bermanfaat.
- 4) Memperluas fungsi dan peran kelompok perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan perempuan untuk berperan aktif dalam inisiatif pembangunan di komunitasnya.

Untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menjalankan usaha, khususnya dalam hal ini perusahaan home industri, pemberdayaan perempuan lebih diprioritaskan di bidang ekonomi. Membangun lingkungan yang mendukung merupakan tindakan utama yang perlu dilakukan dalam kaitannya dengan pemberdayaan perempuan dalam mengelola sektor rumah tangga. Roosganda (2007) menegaskan bahwa tindakan berikut dapat diambil untuk menumbuhkan lingkungan yang menguntungkan:

- 1) Mendorong mereka, memotivasi mereka, dan membuat mereka sadar akan potensi mereka.
- 2) Menciptakan atau menghasilkan akses ke berbagai fasilitas yang akan membantu mereka menjadi lebih mandiri.
- 3) Untuk mencegah dan membatasi persaingan yang dianggap tidak sehat dan sering dimanfaatkan oleh kelompok yang lebih lemah oleh kelompok yang

lebih kuat, salah satu pilihan adalah menawarkan perlindungan terhadap potensi yang sudah ada. Ini disebut sebagai keberpihakan.

b. Strategi Pemberdayaan Perempuan

Pentingnya peran perempuan mulai diakui secara luas. Hal ini dapat ditunjukkan dalam strategi program yang menekankan pada masalah “Perempuan dalam Pembangunan”. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa perempuan, terutama mereka yang miskin, harus mandiri agar setiap orang dapat mengambil manfaat dari kemajuan. Konsep partisipasi perempuan dalam pembangunan muncul. Perempuan dianggap sebagai salah satu sumber daya manusia yang paling berharga, memungkinkan orang-orang yang secara historis terpinggirkan untuk mengambil bagian dalam pertumbuhan.

Metode ini memungkinkan untuk fokus pada peran yang dimainkan perempuan yang lebih produktif. Tujuannya adalah untuk menyoroti produktivitas angkatan kerja perempuan, terutama yang berkaitan dengan pendapatan perempuan, tanpa memeriksasisi reproduktifSelain itu, wanita dewasa usia subur yang kurang beruntung atau dicap miskin menjadi sasaran strategi ini. Pendekatan WID memiliki dampak yang signifikan terhadap kaum liberal di Barat. Untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keterampilan seperti menjahit, menyulam, dan kegiatan peningkatan pendapatan lainnya, proyek-proyek yang ada pada saat itu bekerja sangat keras (Nugroho 2008:137-138). Strategi *Gender and Development* (GAD) digunakan sebagai semacam tindak lanjut karena pada kenyataannya pendekatan ini tidak berhasil mengikutsertakan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk proyek-proyek pembangunan (2008: 140).

Strategi ini didasarkan pada pertimbangan kebutuhan laki-laki dan perempuan selama proses pembangunan. Strategi ini lebih menekankan pada isu gender daripada sekedar isu perempuan. Pendekatan GAD untuk perempuan dalam pembangunan adalah satu-satunya yang memperhitungkan semua elemen kehidupan perempuan dan semua pekerjaan yang mereka lakukan, apakah itu tenaga kerja reproduktif, produktif, swasta, atau publik. Ini juga bertindak sebagai semacam penolakan untuk setiap inisiatif yang mendevaluasi nilai. bekerja untuk mempertahankan rumah tangga dan keluarga. Strategi ini kadang-kadang disebut sebagai "pemberdayaan". Oleh Silawati (1996:209–210), yang menyatakan bahwa “Pemberdayaan memanfaatkan pendekatan GAD lebih bertumpu pada teknik pemberdayaan (bottom-up) atau strategi yang dilaksanakan dari bawah ke atas dan tentunya tidak menggunakan pemberdayaan dari atas ke bawah. strategi (atas-bawah)". Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pembinaan dan peningkatan keterampilan perempuan, khususnya dalam penelitian ini dalam bidang pengembangan industri rumah tangga. Pemberdayaan merupakan salah satu strategi penting dalam memberikan peluang dan peningkatan pendapatan ekonomi, yang merupakan upaya untuk mengaktualisasikan potensi perempuan agar lebih mandiri.

c. Pendekatan Efisiensi terhadap Women in Development(WID)

Menurut strategi Overseas Development Administration (ODA) yang diterbitkan pada tahun 2009, menurut Silawati (1996, 206) “Perempuan adalah pemegang kunci masyarakat untuk menjadi lebih produktif dan dinamis. Perempuan akan lebih produktif secara ekonomi jika mereka dalam keadaan sehat,

memiliki akses ke pendidikan yang layak, dan memiliki sumber daya yang lebih tersedia bagi mereka.

Strategi efisiensi beroperasi pada dua tingkat. Perempuan harus dilibatkan dalam proyek-proyek pembangunan untuk memastikan efisiensi karena mereka seringkali lebih dapat diandalkan dan efektif daripada laki-laki. Kedua, kebijakan pembangunan tingkat makro membutuhkan produktivitas dan efisiensi dalam program penyesuaian struktural. Silawati (1996, 207).

d. Pendekatan Pemberdayaan atau Gender and Development(GAD)

Pendekatan pemberdayaan, menurut Julia dalam Silawati (1996, 210), mengakui bahwa tujuan pembangunan bagi perempuan adalah dari segi kemandirian dan kekuatan internal, dan lebih menitikberatkan pada penegakan hukum yang mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan daripada pemberdayaan perempuan. secara khusus. Menurut perspektif pemberdayaan, salah satu prasyarat perubahan sosial yang langgeng adalah tumbuhnya organisasi perempuan yang meningkatkan mobilitas politik, kesadaran publik, dan pendidikan. Ada empat (empat) langkah strategis yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pemberdayaan perempuan menjadi prioritas pertama,
- 2) disusul dengan kesetaraan gender.
- 3) Menciptakan Peluang dan Tindakan Penguatan (Affirmative Action)
- 4) Harmonisasi atau sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Maulana (2009: 46) mencantumkan strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perempuan, antara lain:

- 1) Pelaksanaan pemberdayaan melalui sistem kelembagaan atau kelompok;
- 2) Program pemberdayaan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok;
- 3) Pengembangan lembaga keuangan mikro di tingkat lokal;
- 4) Penyediaan modal awal untuk menjalankan usaha ekonomi produktif;
- 5) Pengembangan usaha yang berkelanjutan;
- 6) Keterlibatan keluarga atau suami dalam kelompok sasaran;
- 7) Keterpaduan peran dari semua pemangku kebijakan
- 8) Ketersediaan dan fasilitasi pembiayaan usaha;
- 9) Layanan pendukung, modal bergulir untuk akumulasi modal, dan
- 10) Dukungan dan penguatan kelompok.

Pembenaran di atas membawa seseorang pada kesimpulan bahwa laki-laki harus memihak untuk melakukan pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan pengertian gender dan pembangunan yang memberikan penekanan yang sama pada partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

2.1.2. Konsep Lembaga Dompot Ummat

a. Profil Dompot Ummat

Berdasarkan data yang disajikan oleh lembaga Dompot Ummat Kalimantan Barat (2019) bahwa lembaga Dompot Ummat merupakan lembaga kemanusiaan lokal milik masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) yang mendedikasikan diri untuk kerja kemanusiaan memberi pelayanan dan pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu. Kerja kemanusiaan berbasis dana masyarakat sendiri (lokal)

yang terdiri dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, CSR, serta dana kemanusiaan lainnya.

b. Awal Kehadiran

Dompot Ummat Kalbar berdiri di Kota Pontianak pada tanggal 3 Desember 2001. Didirikan atas dasar keprihatinan melihat kondisi kemiskinan di kota Pontianak maka pada saat itu didirikanlah Dompot Ummat oleh Viryan, Awaludin Razab dan Haitami Salim. Sejak Awal didirikan Dompot Ummat selalu berkomitmen pada isu-isu kemanusiaan dan kemandirian dhuafa dan saat ini berkantor di Jl. Karimata No. 2A Kota Pontianak.

c. Legalitas Lembaga

- Akta Notaris (perubahanan) No. 103 tahun 2015 tentang pendirian Yayasan Dompot Ummat Kalimantan Barat dari kantor Notaris Edi Dwi Pribadi.
- SK Walikota Pontianak 395 Tahun 2005 Tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalimantan Barat.
- SK Menkumham No. AHU-0007744.AH.01.04 Tahun 2015 Tentang Yayasan Dompot Ummat.

d. VISI

Mengembangkan masyarakat di Kalimantan Barat yang berdaya dan memiliki keunggulan kompetitif.

e. MISI

- Mengembangkan layanan sosial dasar masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya di daerah pesisir, pedalaman, dan perbatasan.

- Melakukan pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Barat dengan meningkatkan skala pengelolaan sumber daya lokal.
- Menumbuhkan diri menjadi organisasi nirlaba lokal di Kalimantan Barat yang unggul.

2.2. Indikator Pemberdayaan

Menurut Putra dalam Suharto (2010, 80), pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan antara lain pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa strategi pemberdayaan mencakup 5 elemen yang mana setiap elemen saling mempengaruhi satu sama lainnya seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemungkinan yaitu dengan menciptakan kondisi atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk dapat berkembang lebih jauh dalam bidang ekonomi adalah dengan menciptakan pemungkinan pemanfaatan potensi lokal yang ada.
2. Penguatan yaitu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat terutama berkaitan dengan potensi lokal sosial sehingga mampu untuk memecahkan masalah serta berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Penguatan dapat berupa menjaga keberhasilan atau pencapaian hasil yang telah diperoleh dalam proses pemberdayaan.
3. Perlindungan yaitu dengan cara melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Perlindungan

merupakan proses yang melindungi tahapan penguatan yang telah dicapai dalam proses pemberdayaan. Perlindungan ini menjaga agar tahapan pengamatan yang telah dilakukan tidak mengalami kemunduran dan kegagalan.

4. Penyokongan yaitu dengan cara memberikan bimbingan, penyuluhan, dan dukungan agar masyarakat mampu mendapatkan akses informasi yang lebih sehingga mampu memanfaatkan peluang yang ada.
5. Pemeliharaan yaitu dengan menciptakan situasi yang kondusif dimana selalu terjaga dan terpelihara, hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan peran kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Adapun basis pemberdayaan meliputi :

1. Pengembangan berbasis masyarakat.
2. Keberlanjutan.
3. Partisipasi masyarakat.
4. Pengembangan modal sosial masyarakat.
5. Penghapusan ketimpangan gender.

2.3. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian yang dimaksud yaitu meliputi kemandirian dalam berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Sehingga masyarakat memiliki

kemampuan untuk memikirkan memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.

2.4. Dimensi Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut Sukes (2017, 60) “dianalisis melalui 5 dimensi yang meliputi dimensi kesejahteraan dimana variabel tersebut dapat diukur dengan mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan makanan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu dimensi akses atas sumber daya, dalam variabel tersebut dapat diketahui dengan mengukur akses terhadap modal, produksi, informasi, keterampilan dan lainnya. Adanya kesenjangan dalam mendapat akses terhadap sumber daya akan mengakibatkan terjadinya perbedaan produktivitas di antara mereka. Yang ketiga yaitu dimensi penyadaran atau kesadaran kritis, dalam variabel ini diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya upaya penyadaran terhadap kesenjangan yang disebabkan oleh faktor sosial budaya yang bersifat dapat diubah. Penyadaran berarti terjadinya penumbuhan sikap kritis oleh tenaga kerja perempuan. Yang keempat yaitu dimensi partisipasi, variabel ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan gender dalam partisipasi dimana terwakili atau tidaknya tenaga kerja perempuan dalam lembaga yang terkesan elit. Upaya pemberdayaan mengarah pada kegiatan pengorganisasian. Dan yang terakhir yaitu dimensi kontrol variabel ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan dalam alokasi kekuasaan di segala bidang, penguasaan alat-alat kerja, pembentukan modal dan lainnya.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pemberdayaan meliputi 5 dimensi yang mana kelima dimensi tersebut merupakan suatu proses yang berkesinambungan sehingga setiap tahap dimensi memiliki peran terhadap tahap dimensi selanjutnya.

2.5. Hambatan dalam Pemberdayaan

Menurut Rachmat (2018, 45-46) “belum optimalnya pergerakan masyarakat. Pengorganisasian masyarakat dalam pemberdayaan, advokasi, kemitraan, dan peningkatan sumberdaya masih terbatas. Yang kedua pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan struktural saja, Pendekatan ini bersifat normatif atau rasional dan empiris saja. Sehingga kurang dalam proses penguatan yang lebih terarah, menyeluruh, dan saling terkait serta realistis. Dan yang terakhir yaitu terbatasnya sumber daya pendukung termasuk sumber daya manusia, informasi dan pembiayaan.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam proses pemberdayaan dikarenakan belum optimalnya pergerakan masyarakat, pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan struktural saja serta terbatasnya sumber daya pendukung.

2.6. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat beberapa prinsip dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah kesukarelaan, otonom, keswadayaan, partisipatif, demokratis, egaliter, keterbukaan, kebersamaan, akuntabilitas, desentralisasi, prinsip-prinsip

menghargai yang lokal, prinsip-prinsip yang ekologis, serta prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia.

2.7. Tujuan Pelatihan

Tujuan pelatihan dibedakan dalam tiga kategori pokok domain antara lain:

1. *Cognitivedomain* merupakan tujuan pelatihan yang berkaitan dengan meningkatkan pengetahuan peserta pelatihan.
2. *Affectivedomain* merupakan tujuan pelatihan yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku peserta pelatihan.
3. *Psychomotordomain* merupakan tujuan pelatihan yang berkaitan dengan keterampilan peserta pelatihan." Santoso (2013, 55)

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa ketiga tujuan pelatihan yang disampaikan merupakan standar kompetensi yang harus dicapai dalam pelatihan yang dilaksanakan.

2.8. Unsur-unsur Pelatihan

Dalam merancang sebuah pelatihan diperlukan unsur-unsur dalam pelatihan secara berurutan yang terdiri dari:

1. Pekerjaan yang dilakukan

Pekerjaan terdiri dari sejumlah tugas khusus yang harus dikerjakan oleh orang tingkat kerumitan dan kesulitan yang berbeda antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lainnya. Misalnya seorang dokter yang mempunyai tugas untuk mendiagnosis penyakit seseorang dan membuatkan resep harus siap melayani

orang sakit kapan saja. Mengenai tingkat kesulitan seorang programmer komputer perlu untuk memahami bahasa komputer yang sangat rumit bagi orang awam. Sehingga jika pelatih ingin memperbaiki kinerja pekerjaan maka pekerjaan itu sendiri harus dimengerti sepenuhnya.

2. Orang yang melakukan pekerjaan

Orang yang dilatih untuk melakukan pekerjaan biasanya merupakan orang dewasa. Sehingga prinsip yang digunakan dalam pelatihan adalah pendidikan orang dewasa. Dalam perencanaan harus dipertimbangkan mengenai fakta bahwa orang dewasa telah memiliki pengetahuan, keahlian dan sikap tentang pekerjaan sebagai cara belajar.

3. Kinerja

Kinerja yang dimaksud yaitu seberapa bagus pekerja melakukan tugas tugas pekerjaannya. Sehingga Jika dilihat akan tampak bagaimana seseorang melakukan pekerjaan sesuai standar yang berlaku serta bagaimana hasil dari penampilan orang tersebut dalam bekerja. Pada umumnya, dalam mengubah kinerja pekerjaan akan ditemui adanya tiga hal yaitu bekerja tidak tahu bagaimana mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaannya yang sekarang, pekerja diberikan tugas baru yang memerlukan pengetahuan keterampilan dan sikap yang baru, dan pekerja diberikan pekerjaan yang benar-benar baru. Di dalam setiap kondisi tersebut memerlukan strategi pelatihan yang berbeda-beda ataupun tidak memerlukan pelatihan sama sekali. Perlu atau tidaknya dilakukan pelatihan bergantung pada macam perbedaan yang ditemukan oleh pelatih. Perbedaan ini disebut dengan

perbedaan penampilan, di mana perbedaan ini dapat dihilangkan atau dikurangi melalui belajar dan pelatihan.

2.9. Aspek-aspek yang Diubah Melalui Pelatihan

Menurut Amanah (2014, 46) melalui pelatihan, perubahan yang diharapkan terjadi meliputi aspek pengetahuan tentang materi pelatihan, sikap kerja, dan keterampilan motorik atau skill. Tugas pelatih untuk memungkinkan terjadinya perubahan perilaku antara lain:

1. Menetapkan tujuan dari pelatihan yang telah disesuaikan dengan target yang akan diubah dari peserta latih berdasarkan perbedaan dalam bekerja.
2. Merencanakan rancangan pelatihan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pendidikan peserta, pengalaman, jenis pekerjaan, materi yang diperlukan, metode yang akan digunakan, jangka waktu pelatihan, dan sebagainya.

2.10. Faktor yang Berperan dalam Pelatihan

Menurut Santoso (2013:60) “ada beberapa faktor yang berperan dalam pelatihan, yaitu jenis pelatihan, kedalaman tujuan pelatihan, sumber daya yang tersedia, waktu, peserta pelatihan, metode dan media, ketersediaan pemateri atau pelatih.”

Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa tujuan pelatihan harus mencakup pengetahuan sikap dan keterampilan titik hasil yang diharapkan merupakan perubahan tingkah laku atau sikap dan peningkatan pengetahuan serta ketrampilan yang di observasi atau diamati titik selain itu pelatih atau ke materi haruslah orang

yang mempunyai kualifikasi sebagaimana yang dikehendaki dalam pencapaian tujuan yang diharapkan.

2.11. Alur Pelatihan

Menurut Santoso (2013:45) "terdapat tiga tahap proses pelaksanaan pelatihan yang membentuk sebuah alur dalam penyelenggaraan pelatihan yaitu pelatihan (*pre training*). Pelaksanaan pelatihan (*on going training*), pasca pelatihan (*post training*)". Dari pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam tahap pra pelatihan, terdapat rancangan yang perlu direncanakan sebelum melaksanakan kegiatan pelatihan, diantaranya:

- a) Identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan *training need assessment*
- b) Merumuskan sasaran/tujuan pelatihan
- c) Mempersiapkan kurikulum dan materi

Sedangkan dalam tahap pelaksanaan pelatihan (*on the job training*) adapun tahapan tahapannya meliputi:

- a) Memilih dan menentukan metode
- b) Memilih dan menentukan teknik pelatihan yang digunakan

Terakhir yaitu tahap pasca pelatihan (*pos training*) dimana evaluasi pelatihan memiliki fungsi sebagai pengendali proses dan hasil dari program pelatihan sehingga program pelatihan agar lebih sistematis, efektif dan efisien. Evaluasi merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang diperlukan

untuk menunjang program pelatihan peninjauan kembali dan dampak latihan akan dilakukan dalam evaluasi pelatihan.

2.12. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Justin Purwadi pada tahun 2009 dengan judul penelitian "perempuan masyarakat pesisir dalam memenej waktu di Kecamatan Sungai Raya kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat".

Dalam sudut pandang penelitian perspektif gender metode penelitian kuantitatif sebenarnya juga diperlukan tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan desain penelitian dengan pendekatan kualitatif atau paradigma fenomenologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran perempuan istri dalam keluarga nelayan terbagi dalam dua golongan yaitu yang pertama istri nelayan yang tidak mempunyai pekerjaan lain selain kegiatan kerumahtanggaan dan golongan kedua istri yang mempunyai pekerjaan sambilan selain pekerjaan rumah tangga.

Dengan masing-masing golongan mempunyai pola kehidupan yang berbeda. bagi mereka yang hanya melakukan kegiatan rumah tangga mempunyai alasan kebutuhan keluarga dicukupi oleh hasil suaminya sebagai nelayan sedangkan para istri yang melakukan pekerjaan di luar kerumahtanggaan ingin membantu keluarga dengan memanfaatkan waktunya dengan bekerja produktif.

Jenis-jenis pekerjaan produktif yang dilakukan oleh perempuan nelayan selain melakukan pekerjaan rumah tangga, juga melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang seperti berladang, menanam bunga untuk dijual, membantu menjual ikan, membuat kue untuk dijual dan membuat ceriping untuk dijual.

2. Penelitian yang relevan kedua yaitu penelitian yang dilakukan Abigail 2017, penelitian ini berjudul “Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Retok Kecamatan Kuala mandor B.

Faktor yang melatarbelakangi penelitian ini antara lain belum meratanya pemahaman Masyarakat Desa Retok terhadap program PKK, kurangnya dukungan keluarga terhadap kegiatan PKK, kesibukan mencari nafkah, jarak antar daerah yang membuat perjalanan kurang nyaman, kebutuhan untuk komunikasi dan informasi, dan semua faktor ini. Meskipun sumber daya manusia, alam, dan sarana dan prasarana semuanya mencukupi dalam segala aspek kehidupan, namun pemanfaatannya masih di bawah standar.

Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga PKK merupakan wadah komunitas bagi organisasi perempuan. PKK berfungsi sebagai organisasi masyarakat dan mitra pemerintah, bertindak pada setiap tingkatan sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengontrol, dan penggerak. Dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera, PKK memiliki tanggung jawab untuk mendukung pemerintah desa dan kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan unik dari penelitian sebelumnya dan belum dieksplorasi oleh orang lain. Kajian ini akan melihat bagaimana inisiatif pemberdayaan perempuan yang dilakukan di lembaga Dompot Ummat di Pontianak.

2.13. Kerangka Pikir

